

RAHASIA



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. DEWI SARTIKA NO. 47 TELP. (0451) 488152 - 488034

**LAPORAN HASIL REVIU
ATAS
LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH (LPPD)
PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022**

NOMOR : 700.1.2.8/183.1/R-LPPD/RHS/2023
TANGGAL : 3 MARET 2023
TAHUN : 2023



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH
JALAN DEWI SARTIKA NOMOR 93 TELP. 0451- 488152 PALU

LAPORAN HASIL REVIU (LHR)
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAHTAHUN 2022

Nomor : 700.1.2.8/183.1 /R-LPPD/RHS/III/2023
Tanggal : 30 Maret 2023
Sifat : Tujuan tertentu
Lampiran : 1 (satu) Exemplar
Hal :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 09/56/ITDA, Tanggal 14 Februari 2023 dengan hormat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 Tahun, Kepala Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri. Penyusunan LPPD mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Data yang dituangkan dalam LPPD wajib diverifikasi dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk Reviu. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2020. Data dan dokumen pendukung sebelum ditandatangani Kepala Perangkat Daerah wajib direviu oleh Inspektorat Provinsi untuk LPPD Provinsi dan oleh Inspektorat Kabupaten / Kota untuk LPPD Kabupaten/Kota.

Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan. Verifikasi dan validasi dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam bentuk revidu, yang merupakan penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. Revidu sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan berupa penjaminan mutu (*quality assurance*) atas penyusunan LPPD oleh Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas terhadap kebenaran informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akan dituangkan dalam rancangan LPPD.

A. Dasar Penugasan

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/209/IJ tanggal 20 Januari 2022 tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2021
6. Surat Tugas Gubernur Nomor : 094/56/ITDA, Tanggal 14 Februari 2023.

B. Ruang Lingkup Revidu

Revidu mencakup pengujian:

1. Kesesuaian materi dan sistematika LPPD (merujuk pada KK.01).
2. Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil. Untuk LPPD Provinsi Lampiran (merujuk pada KK.02).

3. Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja kunci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil. Untuk LPPD Kabupaten / Lampiran (merujuk pada KK.02).
4. Validitas data pada (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil.

1) Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

(1) Capaian kinerja makro

a. Indeks pembangunan manusia (IPM)

Indeks pembangunan manusia (IPM) untuk tahun 2022 mengalami peningkatan namun tidak signifikan yaitu sebesar 70,28 poin dibanding tahun 2021 sebesar 69,79 poin

b. Angka kemiskinan.

Angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 13,05 % dan berhasil ditekan pada tahun 2022 sebesar 12,33 % atau mengalami penurunan sebesar 0,72%

c. Angka pengangguran

Angka pengangguran untuk tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yaitu pada tahun 2021 angka pengangguran mencapai 3,75% sedangkan tahun 2022 menurun menjadi 3,00%

d. Pendapatan perkapita

Pendapatan perkapita (harga berlaku) pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding tahun 2021 yaitu pada tahun 2022 mencapai Rp.85,00 Juta pertahun sedangkan tahun 2021 sebesar Rp.81,73 juta per tahun.

e. Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio)

Ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 0,305 poin dibanding tahun 2021 sebesar 0,326 poin, mengalami penurunan sebesar 0,021 poin.

(2) Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

A. Capaian Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur Dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundangan-undangan tentang Pemerintahan daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang yaitu sebagai berikut :

1. Bobot nilai perbidang urusan Pemerintahan.

Adapun nilai perbidang urusan Pemerintahan digambarkan dalam tabel berikut :

Table 1 : Bobot nilai perbidang urusan pemerintahan Indikator Output dan Indikator Outcome

Urusan	Output	Outcome	Capaian
1	2	3	4
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	86,9142192
Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	31,3306452
Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	1,5498189
Kesehatan	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	79,4871795
Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100
Kesehatan	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100
Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
Sosial	 Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100
Sosial	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	97,8947368
Sosial	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	60
Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	100
Tenaga Kerja	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja.	23,0769231
Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	0,0165162
Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	0,0051498
Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	18,1777579
Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	92,2904236
Tenaga Kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	Mengukur persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan	11,5641711

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,1706011
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	1,3526505
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	5,2739326
Pangan	Persentase cadangan pangan	Persentase cadangan pangan	66,7070283
Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dibandingkan dengan luas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	87,5063295
Pertanahan	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu	87,5063295
Pertanahan	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	Tersedianya Lokasi Pembangunan lintas kabupaten/kota.	0
Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	78,66
Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	33,3333333
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	Penyajian data kependudukan skala Provinsi dalam satu tahun	100
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan	4,6511628
Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase pengentasan desa tertinggal	Persentase pengentasan desa tertinggal	36,0902256
Pemberdayaan masyarakat dan desa	Persentase peningkatan status desa mandiri	Persentase peningkatan status desa mandiri	240,4761905
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,43

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	59,9108161
Pengendalian penduduk dan keluarga berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	0,0065793
Perhubungan	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio konektivitas Provinsi	0,0067
Perhubungan	V/C Ratio di Jalan Provinsi	V/C Ratio di Jalan Provinsi	0,99
Komunikasi dan Informatika	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100
Komunikasi dan Informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100
Komunikasi dan Informatika	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	3,3684365
Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	7,2463768
Koperasi, usaha kecil dan menengah	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	6,2433569
Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di provinsi	Persentase peningkatan investasi di provinsi	-99,9996399
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	5,0323056
Kepemudaan dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	7,5208083
Kepemudaan dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	190

Statistik	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	65,1162791
Statistik	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	65,1162791
Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Tingkat keamanan informasi pemerintah	19,9819168
Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	0
Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	56,86
Perpustakaan	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	27
Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	80,75
Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	80,83
Kelautan dan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	60,7660446
Kelautan dan Perikanan	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	81,5
Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	102,3041475
Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	-15,3132348
Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	Tingkat hunian akomodasi	46,2024745
Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,7396694

Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	454,3430155
Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	420,8
Kehutanan	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	3938,461539
Kehutanan	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestasi)	0,0010527
Kehutanan	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	2,6515085
Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	24,6987952
Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	100
Perdagangan	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	3886,556577
Perdagangan	Persentase penanganan pengaduan konsumen	Persentase penanganan pengaduan konsumen	100
Perdagangan	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku	57,1428571
Perdagangan	Tertib Usaha	Tertib Usaha	0
Perdagangan	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persentase kinerja realisasi pupuk	85,0645621
Perdagangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	85,620915
Perdagangan	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,9
Perindustrian	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	Pertambahan jumlah industri besar di provinsi	89,7435897
Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	391,42
Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100

Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besaryang dikeluarkan oleh instansi terkait	0
Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0
Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	85
Transmigrasi			0
Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Rasio Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	23,2978614
Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	Rasio PAD	32,9922659
Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	61,9277024
Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	1
Perencanaan dan Keuangan	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3
Perencanaan dan Keuangan	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3
Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	4,5112782
Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	1,2987013
Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	67,6986685
Pengadaan	-	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	138,5712023
Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	260,6536769

Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) 	14,1512722
Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10,9825416
Manajemen Keuangan	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	11,1846691
Manajemen Keuangan	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	1,6906033
Manajemen Keuangan	Assets management	Assets management	2
Manajemen Keuangan	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	14,7244797
Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	104,8429418
Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	100

Sumber : Laporan SILPPD tanggal 21 Maret 2023

2. Bobot capaian kinerja IKK hasil perbidang Urusan pemerintahan
Adapun bobot capaian IKK hasil perbidang urusan pemerintahan dalam tabel berikut :

Tabel 2 : Indikator Capaian Urusan pemerintahan

No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.940.380.744	11.196.367.388		
2.	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.174.820.000	1.172.418.500	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
3.	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.070.749.299	31.460.524.319	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan

4.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13.088.500.512	12.601.656.897		Dikembalikan ke Kas Daerah
5.	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.997.974.126	35.881.379.781	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.973.319.746	12.840.421.996	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
7.	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.630.762.308	59.687.402.172		
9.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.856.744.365	9.442.680.051		
10.	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.904.087.534	21.365.816.589		
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.827.298.213	9.205.453.917		
12.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov.Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.650.158.921	8.475.003.587		
13.	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.175.827.827	27.743.764.369		
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.323.135.480	10.809.905.873		
15.	Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Sulawesi Tengah	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	16.602.714.067	13.362.883.186		
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.421.691.725	1.417.731.675		

17.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.310.738.672	12.602.627.035	Masih lemahnya koordinasi dengan OPD teknis terkait, kab/kota dalam upaya kemandirian pemuda dan prestasi olahraga	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Sulawesi Tengah
18.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.017.453.231	15.582.412.449		Sisa Anggaran Tidak Dicairkan (dikembalikan)
19.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.166.591.412	20.995.023.520		
20	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.072.410.514	11.482.828.045		
21.	Dinas Tanaman Dan Hortikultura	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41.989.397.313	144.243.936.97 2		
22.	Dinas Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.463.983.885	49.612.326.841		
23.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.916.132.870	16.455.594.406		
24.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.339.948.983	15.631.701.692		
25.	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.559.670.296	30.706.315.603		
26.	Bpkad Provinsi Sulawesi	Unsur Penunjang		122.598.054.62		

	Tengah	Urusan Pemerintahan	229.910.315.189	8		
27.	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.564.027.623	13.704.039.983		
28.	Bppid Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.051.861.361	9.225.879.654		
29.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.389.023.303	14.317.800.360		
30.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	103.264.743.707	91.938.130.218		
31.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	81.461.883.566	71.745.635.094		
32.	Inspektorat Daerah Prov. Sulteng	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	21.126.530.876	20.804.546.024		
33.	Bpbd Prov. Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13.506.784.729	11.647.661.368		
34.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	21.853.464.895	20.943.100.865		

Tabel 2 : Indikator Capaian Urusan Pemerintahan

No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
1.	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	11.940.380.744	11.196.367.388		

	Sulawesi Tengah	Daerah Provinsi				
2.	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.174.820.000	1.172.418.500	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
3.	Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	33.070.749.299	31.460.524.319	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
4.	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13.088.500.512	12.601.656.897		Dikembalikan ke Kas Daerah
5.	Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	37.997.974.126	35.881.379.781	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
6.	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.973.319.746	12.840.421.996	Adanya Sisa Anggaran	Sisa Anggaran Tidak Dicairkan
7.	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	61.630.762.308	59.687.402.172		
9.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.856.744.365	9.442.680.051		
10.	Dinas Pangan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.904.087.534	21.365.816.589		
11.	Dinas Lingkungan Hidup	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.827.298.213	9.205.453.917		
12.	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Prov.Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	8.650.158.921	8.475.003.587		
13.	Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	14.175.827.827	27.743.764.369		
14.	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	11.323.135.480	10.809.905.873		

	Dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah	Daerah Provinsi				
15.	Dinas Koperasi Dan Ukm Provinsi Sulawesi Tengah	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	16.602.714.067	13.362.883.186		
16.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	1.421.691.725	1.417.731.675		
17.	Dinas Pemuda Dan Olahraga	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.310.738.672	12.602.627.035	Masih lemahnya koordinasi dengan OPD teknis terkait, kab/kota dalam upaya kemandirian pemuda dan prestasi olahraga	Adanya dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi dalam meningkatkan kemandirian pemuda dan prestasi olahraga Sulawesi Tengah
18.	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	17.017.453.231	15.582.412.449		Sisa Anggaran Tidak Dicairkan (dikembalikan)
19.	Dinas Kelautan Dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.166.591.412	20.995.023.520		
20.	Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tengah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.072.410.514	11.482.828.045		
21.	Dinas Tanaman Dan Hortikultura	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	41.989.397.313	144.243.936.972		
22.	Dinas Kehutanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	52.463.983.885	49.612.326.841		
23.	Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sulawesi Tengah	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.916.132.870	16.455.594.406		

24.	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	16.339.948.983	15.631.701.692		
25.	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.559.670.296	30.706.315.603		
26.	Bpkad Provinsi Sulawesi Tengah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	229.910.315.189	122.598.054.628		
27.	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.564.027.623	13.704.039.983		
28.	Bppid Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.051.861.361	9.225.879.654		
29.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.389.023.303	14.317.800.360		
30.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	103.264.743.707	91.938.130.218		
31.	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	81.461.883.566	71.745.635.094		
32.	Inspektorat Daerah Prov. Sulteng	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	21.126.530.876	20.804.546.024		
33.	Bpbd Prov. Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13.506.784.729	11.647.661.368		
34.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	21.853.464.895	20.943.100.865		

Tabel 3 : Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Uraian Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Permasalahan
1	2	3	4	5	6
1	Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	32.559.670.296	122.598.054.628	
2	BPKAD Provinsi Sulawesi Tengah	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	229.910.315.189	763.279.818.383	
3	Badan Kepegawaian Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.564.027.623	13.704.039.983	
4	Bppid Prov. Sulteng	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	10.051.861.361	9.225.879.654	
5	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	15.389.023.303	14.317.800.360	
6	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	103.264.743.707	91.938.130.218	

7	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	81.461.883.566,00	71.745.635.094	
8	Inspektorat Daerah Prov. Sulteng	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan	21.126.530.876	20.804.546.024	
9	Bpbd Prov. Sulawesi Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	13.506.784.729	11.647.661.368	

Sumber : Drafft LPPd Provinsi Sulawesi Tengah

(1) Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Pertanggungjawaban Pemerintah daerah dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dihasilkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 4 : Realisasi IKU RPJMD

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja dan Satuan	Target 2022	Realisasi	
			2021	2022
Mewujudkan Peningkatan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah Melalui Reformasi Sistem Pendidikan Berbasis Vokasi dan Pelayanan Kesehatan Dasar Yang Merata	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69.74	69.68	70,28
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih (<i>Good Governance And Clean Government</i>)	- Indeks Reformasi Birokrasi - Nilai SAKIP	64.50 74	- 63.50 - 71.00	- 63,56 - 70,46
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Pertumbuhan Ekonomi (%)	9.5	5.03	15,17
Menurunkan Kemiskinan	Presentase Penduduk Miskin	12.18	13.00	12,30
Menurunkan Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	3.07	3.76	3.00
Meningkatkan Kualitas Dan Kuantitas Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Daerah	Indeks Infrastruktur Daerah	56.63	52.59	64,28
Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Dan Wilayah Secara Merata dan Berkeadilan	- Indeks Gini - Inflasi - Indeks Pembangunan Gender (IPG)	- 0.24 - 1.52 - 91.9	- 0.33 - 1.65 - 91.87	- 0.305 - 0.80 - 92,24
Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan, Serta Tangguh Terhadap Bencana	- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup - Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (% BL)	- 79 - 15	- 77.53 - 20	- 78.66 - 99
Mewujudkan Kolaborasi Antara Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Dan Pihak Lainnya Dalam Pembangunan Secara Bersinergi Dan Terintegrasi	Tingkat Efektivitas Kerja Sama Daerah (%)	100	100	100
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perpustakaan	Indeks Pelayanan Publik	3.01	2.65	3.53
Mewujudkan Persiapan Pembentukan Daerah Otonomi Baru	Presentase Kajian Akademik Persiapan DOB Yang Disampaikan Ke KEMENDAGRI RI	100	100	38.46

1) Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi Tugas Pembantuan sebesar Rp. 111.198.930.000 dengan realisasi penyerapan sebesar Rp.105.486.494.603 atau sebesar 94.86% dengan realisasi fisik mencapai 96,16% dengan sisa dan yang tidak terserap sebesar Rp.5.712.435.397.

Adapun Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan Tugas Pembantuan pada tahun anggaran 2022

sebanyak 5 (lima) perangkat daerah dengan rincian dalam tabel 5 berikut :

Tabel 5 : Capaian Kinerja Tugas Pembantuan

NO	SATUAN KERJA	PAGU (Rp)	REALISASI			SISA DANA	KET
			KEUANGAN		FISIK		
			(Rp)	(%)			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH	61.067.102.000	57.360.856.494	93,93	100	3.706.245.506	
2.	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	22.845.081.000	21.107.306.832	92,21	96,21	1.737.774.168	
3.	Dinas KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	378.825.000	377.170.000	99,89	99,56	1.655.000	
4.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI SULAWESI TENGAH	1.924.163.000	1.853.987.300	96,35	100	70.175.700	
5.	DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI SULAWESI TENGAH	24.983.759.000	24.787.173.977	99,21	100	196.576.023	
	JUMLAH	111.198.930.000	105.486.494.603	98,86	96,16	5.712.435.397	

2) Capaian Kinerja Penerapan Standar Pelayanan Minimal

A. Urusan Pendidikan

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Menteri Pendidikan

Kebudayaan Riset dan Teknologi RI menetapkan Peraturan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang memuat tentang :

- 1.1. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (SPM Pendidikan) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap peserta didik secara minimal.
- 1.2. SPM Pendidikan di dalamnya mencakup penerima pelayanan dasar, jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar, dan tata cara pemenuhan pelayanan dasar
- 1.3. Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, dan tata cara pemenuhan standar.
- 1.4. Penerima pelayanan dasar pada :
SPM pendidikan Menengah merupakan peserta didik berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah anak usia 16 -18 Thn yang Sudah Tamat atau sedang belajar di Sekolah Menengah}}{\text{Jumlah anak usia 16 - 18 tahun pada Provinsi yang bersangkutan}} \times 100 \%$$

Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Sulawesi Tengah dalam penyelenggaraan urusan wajib pada Pasal 17 dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 tahun 2022 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Menyatakan bahwa perangkat daerah menyusun rencana pemenuhan pelayanan dasar sesuai perhitungan kebutuhan, menjadikan sebagai prioritas rencana dan rencana pemenuhan pelayanan

dasar menjadi salah satu tolok ukur kinerja penyelenggaraan. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar di muat dalam RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja dan dituangkan dalam bentuk dokumen pelaksanaan anggaran. Adapun penyusunan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi yaitu:

2. Target

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan pemerintah daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu. Target yang direncanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun Anggaran 2022 Sebagai OPD pelaksana SPM Pendidikan untuk pemenuhan SPM digambarkan dalam tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 6 : Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator SPM	Target Capaian per tahun	Target Pencapaian
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Menengah (SMA/SMK/Madrasah Aliyah)	100%	Setiap Tahun
2.	Pendidikan khusus	Jumlah anak usia 4-18 tahun yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus yang berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus	100%	Setiap Tahun

Sumber data: RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026

3. Anggaran

Anggaran dan realisasi penerapan SPM urusan Pendidikan Tahun 2022 digambarkan dalam tabel 7 berikut :

Tabel 7 : Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

Program Dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program Dan Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Ket
BIDANG PEMBINAAN SMA	Persentase SPM dan SNP yang tercapai		31 Sekolah		96,90	115.699.421.883	112.112.379.520	

- Sub. Kegiatan :	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	pada satuan pendidikan SMA				98,94	799.999.850	791.546.146	
- Sub. Kegiatan :	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					97,38	90.877.055.000	88.493.336.000	
- Sub. Kegiatan :	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					97,16	15.020.000.000	14.593.810.000	
- Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah					89,12	5.573.139.275	4.966.512.727	
- Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah					96,69	1.478.696.648	1.429.698.412	
- Sub. Kegiatan :	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					97,41	488.221.233	475.562.750	
- Sub. Kegiatan :	Pengadaan Perlengkapan Sekolah					99,53	324.747.500	323.205.249	
- Sub. Kegiatan :	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					53,08	172.562.577	91.602.675	
- Sub. Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pembinaan SMA)					98,15	964.999.800	947.105.561	
BIDANG PEMBINAAN SMK		Persentase SPM dan SNP yang tercapai pada satuan pendidikan SMK	25 Sekolah			82,86	185.557.814.600	153.761.365.885	
- Sub. Kegiatan :	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						97,07	788.671.675	765.556.600
- Sub. Kegiatan :	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik					99,26	1.199.365.650	1.190.482.786	
- Sub. Kegiatan :	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan					98,20	638.917.600	627.407.030	
- Sub. Kegiatan :	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa (Pembinaan SMK)					99,41	1.139.172.900	1.132.479.400	

- Sub. Kegiatan :	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SMK					95,16	341.169.575	324.659.575	
- Sub. Kegiatan :	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan					93,32	558.829.975	521.499.250	
- Sub. Kegiatan :	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK)					99,57	3.248.652.500	3.234.781.450	
- Sub. Kegiatan :	Rehabilitasi Ruang Kelas (Pembinaan SMK)					99,59	1.367.363.000	1.361.722.740	
- Sub. Kegiatan :	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (Pembinaan SMK)					99,68	695.311.000	693.062.950	
- Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah (Pembinaan SMK)					93,98	330.832.875	310.903.886	
- Sub. Kegiatan :	Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (Pembinaan SMK)					99,36	1.431.070.000	1.421.881.500	
- Sub. Kegiatan :	Pembangunan Ruang Praktik Siswa (DAK Pembinaan SMK)					81,80	173.818.457.850	142.176.928.718	

Sumber : Bagian Program Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan provinsi Sulawesi Tengah

3. Realisasi

Mutu Pelayanan dasar yaitu kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan secara minimal dalam pelayanan dasar Pendidikan sesuai dengan Standar Teknis agar hidup lebih layak. Mutu pelayanan dasar bidang pendidikan meliputi :

- a. Standar jumlah kualitas barang dan/atau jasa Untuk perhitungan jumlah rombongan belajar per satuan pendidikan dinyatakan dalam tabel sbb:

Tabel 8 : Jumlah Rombongan Belajar SMA/SMK berdasarkan Jumlah Murid

No	Uraian	Semester Ganjil	Jumlah Rombel	Semester Genap	Jumlah Rombel
1	SMAN dan Swasta	79,420	2206	46,672	1296
2	SMKN dan Swasta	43,311	1203	25,963	721

Berdasarkan tabel diatas jumlah Rombongan belajar pada satuan pendidikan dibandingkan dengan jumlah rombel yang seharusnya terdapat perbedaan yaitu :

- Jumlah Siswa belajar SMA pada semester Ganjil 79,420, jumlah rombongan belajar paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yang seharusnya adalah : $79,420 : 36 = 2,206.111$ dibulatkan jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yaitu 2,207.
- Jumlah Siswa belajar SMK pada semester Ganjil 43,311, jumlah rombongan belajar paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yang seharusnya adalah : $43,311 : 36 = 1,203.08$. dibulatkan jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yaitu 1,204. Digambarkan dalam tabel sbb :

Tabel 9 : Perbandingan Rombongan Belajar SMA/SMK berdasarkan Jumlah Murid dan yang seharusnya

No	Uraian	Semester Ganjil	Jumlah Rombel yang seharusnya	Jumlah rombel yang ada sekarang	Semester Genap	Jumlah Rombel yang seharusnya	Jumlah rombel yang ada sekarang
1	SMAN dan Swasta	79,420	2207	2687	46,672	1296	1945
2	SMKN dan Swasta	43,311	1204	2685	25,963	721	1943

Berdasarkan tabel diatas jumlah Rombongan belajar pada

satuan pendidikan dibandingkan dengan jumlah rombel yang seharusnya terdapat perbedaan yaitu :

- Jumlah Siswa belajar SMA pada semester Ganjil 79,420, jumlah rombongan belajar paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yang seharusnya adalah : $79,420 : 36 = 2,206.111$ dibulatkan jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yaitu 2,207.
- Jumlah Siswa belajar SMK pada semester Ganjil 43,311, jumlah rombongan belajar paling sedikit 20 siswa dan paling banyak 36 siswa. Jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yang seharusnya adalah : $43,311 : 36 = 1,203.08$. dibulatkan jumlah rombongan belajar pada tingkat SMA yaitu 1,204. Digambarkan dalam tabel sbb :

Tabel 10 : Perbandingan Rombongan Belajar SMA/SMK berdasarkan Jumlah Murid dan yang seharusnya

No	Uraian	Semester Ganjil	Jumlah Rombel yang seharusnya	Jumlah rombel yang ada sekarang	Semester Genap	Jumlah Rombel yang seharusnya	Jumlah rombel yang ada sekarang
1	SMAN dan Swasta	79,420	2207	2687	46,672	1296	1945
2	SMKN dan Swasta	43,311	1204	2685	25,963	721	1943

- b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 11 : Jumlah Guru dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Jenjang	Guru BK			Guru Kelas			Guru Mapel			Guru Tik		
	Bersertifikat	Tidak bersertifikat	Jumlah	bersertifikat	tidak bersertifikat	Jumlah	Sertifikat	tidak bersertifikat	Jumlah	Sertifikat	Tidak bersertifikat	Jumlah
SMA	95	163	258	21	47	68	1976	3472	5448	11	33	44

SMK	42	100	142	5	40	45	1427	2420	3847	2	17	19
Jumlah	137	263	400	26	87	113	3403	5892	9295	13	50	63

Berdasarkan dari data diatas kita dapat memperoleh presentase keberadaan jumlah guru dan tenaga kependidikan SMA/SMK yaitu :

- Guru BK yang bersertifikat sebanyak 34,25% dari total jumlah guru BK
- Guru Kelas yang bersertifikat sebanyak 23,00%, dari total jumlah guru kelas
- Guru Mapel yang bersertifikat sebanyak 36,61% dari total jumlah guru bersertifikat
- Guru TIK yang bersertifikat sebanyak 20,63% dari total jumlah TIK

Dari perolehan data diatas maka presentase keberadaan jumlah guru dan tenaga SMA/SMK Negeri dan swasta masih berada di bawah 50% ini berarti Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu meningkatkan kualitas jumlah guru tenaga kependidikan bersertifikat.

- 1) Standard Jumlah dan kualitas tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 12 : Jumlah Kepala Sekolah berdasarkan kualitas Pendidikan

Jenjang	Jumlah Kepala Sekolah	PNS/D4/SI	Honor
SMAN/Swasta	228	222	6
SMKN/Swasta	176	144	32
	404	366	38

Sumber Data Dapodik tahun 2022

Berdasarkan tabel tersebut diatas, presentase jumlah Kepala Sekolah SMAN/Swasta PNS sebesar 90,59 %, sedangkan presentase jumlah Kepala Sekolah SMKN/Swasta Non PNS

sebesar 9,40 % Dari data tersebut diatas bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah rata-rata sebagai PNS

- 2) Standard Jumlah dan kualitas tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 13 : Jumlah Kepala Sekolah berdasarkan kualitas Pendidikan dan Pelatihan SMA/SMK Negeri

Jenjang	Diklat Cakep	Diklat Penguatan	Belum Diklat	Jumlah Kepala Sekolah
SMA Negeri	58	86	32	176
SMK Negeri	52	43	12	107
Jumlah	110	129	44	283

Sumber Data Bidang Dapodik tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, presentase jumlah Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri yang telah mengikuti Diklat baik Diklat Cakep dan Diklat Penguatan sebesar 84,45%, sedangkan presentase jumlah Kepala Sekolah SMKN/Swasta yang belum mengikuti diklat sebesar 15,54%. Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa masih ada Kepala Sekolah SMA/SMK Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- 3) Standar Jumlah dan kualitas tenaga Administrasi) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 14 : Jumlah Tenaga Kependidikan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jenjang	Jumlah Tenaga Admininstrasi	D4/SI	Belum D4/SI	SMA /Paket C	SMP	SD	Tidak Sekolah
---------	-----------------------------	-------	-------------	--------------	-----	----	---------------

SMAN/Swasta	865	292	76	484	7	4	2
SMKN/Swasta	574	163	58	343	4	3	3
Jumlah	1,434	455	134	827	11	7	5

Sumber Data Dinas pendidikan dan kebudayaan tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, presentase jumlah tenaga kependidikan SMAN/Swasta pada jenjang pendidikan D4/SI 31,72%, jenjang Belum D4/S1 9,34% Tamatan SMA/Paket C 57,67%, jenjang SMP 0,76, jenjang SD 0,48 dan yang tidak bersekolah 0,34. Dari data tersebut diatas bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah masih perlu meningkatkan presentasi tenaga kependidikan SI/D4.

- 4) Standar Jumlah Pengawas SMA/SMK Negeri dan swasta pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebagai berikut :

Tabel 15 : Jumlah Pengawas SMA/SMK Negeri

Jenjang	Jumlah Sekolah	Jumlah Pengawas
SMA Negeri	176	33
SMK Negeri	107	18
Jumlah	283	51

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh presentase jumlah pengawas sebesar 18,21% pada Sekolah Menengah di Provinsi Sulawesi Tengah. Namun tidak menunjukkan jenis pengawas sekolah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru pada Pasal 54 ayat (8) dan (9) Pengawas terdiri dari :

- a. Pengawas Satuan Pendidikan
- b. Pengawas Mata Pelajaran atau kelompok belajar

- 5) Satuan Pendidikan yang berakreditasi C

Tabel 16 : Jumlah Sekolah yang berakreditasi

Status Akreditasi	
-------------------	--

Jenjang	Sekolah	A	B	C	Tidak Akreditasi	Data Kosong
SMA	232	70	103	40	3	16
SMK	183	19	87	52	6	19
Jumlah	415	89	190	92	9	35

Berdasarkan tabel diatas sekolah yang berakreditasi C hanya 22,16% sedangkan yang tidak berakreditasi 2,1% hal ini menunjukkan bahwa sebagian sekolah SMA/SMK sudah berakreditasi B yaitu 45,78% sedangkan sekolah berakreditasi A 21,45%. Sementara indeks satuan pendidikan yang berakreditasi C yang dilaporkan pada tahun 2022 adalah 0.

4. Dukungan Personil

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Sub Bagian Perencanaan Program
4. Sub Bagian Keuangan dan Aset
5. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
6. Kabid Pembinaan SMA
7. Seksi pembinaan peserta Didik
8. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMA
9. Seksi Sarana dan prasarana
10. Kabid Pembinaan SMK
11. Seksi pembinaan peserta Didik
12. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum SMK
13. Seksi Sarana dan prasarana
14. Kabid Pembinaan PKPLK
15. Seksi pembinaan peserta Didik
16. Seksi Kelembagaan dan Kurikulum PKPLK
17. Seksi Sarana dan prasarana

18. Kabid PTK & Fasilitas Tugas Pembantuan
19. Seksi PTK SMA
20. Seksi PTK SMK dan PKPLK
21. Seksi Fasilitas tugas Pembantuan
22. Kabid Kebudayaan
23. Seksi Pembinaan kesenian,tradisi dan Kepercayaan terhadap Tuhan YME
24. Seksi Pembinaan Sejarah dan nilai budaya
25. Seksi Cagar Budaya dan Permusiuman
26. UPT TKIP
27. UPT permusiuman dan Taman Budaya
28. Cabang Dinas Wilayah I
29. Cabang Dinas Wlayah II
30. Cabang Dinas Wilayah III
31. Cabang Dinas Wilayah IV
32. Cabang Dinas Wilayah V
33. Cabang Dinas Wilayah 6 orang
34. Kepala Sekolah 404 Orang
35. Guru Mapel 9.295 orang
36. Guru BK 400 orang
37. Guru TIK 63 orang
38. Guru Kelas 113 orang
39. Guru ASN 5.653 orang
40. Guru bersertifikasi 3.920 orang
41. Guru dengan Pendidikan SI/D4 9.802 orang
42. Fungsional/Staf 293 Orang

Dukungan tenaga dan personil untuk tingkat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi tengah disusun berdasarkan bidang masing masing sesuai dengan jenis pelayanan, saling berkoordinasi untuk menghasilkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang bermutu dan baik

5. Permasalahan dan Solusi

5.1 Permasalahan

- a. Pelayanan Anak pada Sekolah berusia 16-18 tahun sudah baik tetapi masih ada penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA/SMK tidak masuk pada pendataan pada DAPODIK (Aplikasi Pendataan Dinas Pendidikan) dan EMIS (Aplikasi Pendataan Kemenag). adapun data BPS yang dirilis tahun 2022 peserta didik SMA/SMK Negeri /Swasta /Sederajat sebagai Berikut :

Tabel 17 : Peserta Didik / Sederajat Provinsi Sulawesi Tengah menurut Data BPS

No	Uraian	Semestern Ganjil
1	SMAN dan Swasta	79,520
2	SMKN dan Swasta	46,501
3	SMA Formal Sederajat Kemenag	21,046
	Jumlah	147,067

Sumber data : Provinsi dalam angka tahun

- b. Data peserta didik yang diperoleh memiliki perbedaan antara data pada bidang SMA/SMK dan Data Dapodik.
- c. Data Jumlah Rombongan belajar SMAN/Swasta dan SMKN/Swasta melebihi dari Jumlah Rombongan Belajar yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Kualitas Guru Pendidik yang bersertifikat masih berada di bawah 50%
- e. Kualitas tenaga Administrasi masih berada di bawah 50%
- f. Agar dapat dijelaskan jumlah pengawas sekolah dan pengawas mata pelajaran atau kelompok belajar.
- g. Meningkatkan Sekolah berakreditasi C menjadi B

B. Urusan Kesehatan

Penetapan SPM dilakukan berdasarkan kriteria barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang bersifat mutlak dan mudah distandarkan yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu pelayanan Dasar. Untuk mekanisme penerapan SPM maka tidak lagi ditentukan berdasarkan indikator SPM dan batas waktu pencapaian tetapi mengutamakan penerapan SPM dengan berdasarkan:

- a. Pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis;
- b. Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan Dasar;
- c. Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan Dasar; dan
- d. Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar, yang kesemuanya itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan bukan oleh kementerian terkait.

Selanjutnya, mengingat makna Pemerintah Daerah menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tidak hanya pada Daerah kabupaten dan kota namun juga pada Daerah provinsi maka SPM tentu juga harus dimaknai tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah kabupaten/kota saja tetapi juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten Kota jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam Peraturan Meteri Kesehatan tersebut sebagai berikut :

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah

provinsi

- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

2. Target Pencapaian SPM

Berdasarkan Permendagri Nomor 100 tahun 2021 Capaian kinerja pemerintah daerah baik Provinsi maupun kabupaten/Kota dalam memberikan standar pelayanan Minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 18 : Target Capaian SPM Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar / Indikator SPM	Nilai (%)	Waktu Pencapaian (Tahun)	Perhitungan Pembiayaan (Rp)
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.			
	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi Bencana	100	2021	223.190.000
2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah Provinsi			
	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	100	2021	288.375.525

3. Realisasi

Realisasi capaian SPM tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 19 : Realisasi capaian SPM tahun 2022

No	Indikator SPM	Sasaran Dalam Tahun	Capaian Dalam Tahun	%
A	PROVINSI			
1	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.	46.102 penduduk	46.102 penduduk	100%

2	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	212.234 Penduduk	212.234 Penduduk	100%
---	--	---------------------	---------------------	------

Adapun capaian SPM bidang Kesehatan tahun 2022 yang ditetapkan dengan target pencapaian SPM diuraikan sebagai berikut :

Provinsi :

1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.

Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana adalah 100%, dengan menghitung Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu satu tahun di bagi Jumlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana dalam satu tahun yang sama dikali 100%.

Pencapaian indikator Upaya Penanggulangan Krisis Kesehatan & Masalah Kesehatan pada tahun 2022 telah mencapai target. dimana secara provinsi capaian Kab/Kota yang membentuk PSC 119 baru mencapai 58,33%, dan tenaga sumber daya kesehatan PSC yang terlatih kegawatdaruratan (BHD,GELS,ACLS,ATLS) masih sebatas PSC Dinas Kesehatan Provinsi. Namun sebagai awal dari penerapan SPM ini Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui UPT Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu (P2KT) telah membuat peta rawan bencana serta penentuan jumlah penduduk di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang berpotensi bencana tersebut.

Kegiatan yang dilakukan dalam pencapaian target antara lain :

- a. KIE bagi petugas kesehatan

- 1) Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam

penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana

- 2) Percepatan pembentukan PSC 119 di Kabupaten/Kota
- 3) Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan

b. KIE bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana

- 1) Pemantauan Potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota
- 2) Penyuluhan dan pelayanan kesehatan dasar pada masyarakat di hunian sementara Petobo dan desa Bangga

2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi.

Capaian kinerja Pemerintah daerah Provinsi dalam melakukan pelayanan kepada sasaran kondisi KLB , dengan menghitung Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dibagi Jumlah orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB dikali 100%.

Untuk memenuhi target kinerja tersebut dilakukan melalui kegiatan antara lain :

No	Kegiatan
I	Program Surveilans APBD
a.	Bimtek Surveilans aktif Rumah Sakit dan Yankes Swasta Untuk Kasus PD3I dan Penyakit menular Lainnya
b.	Pemantauan Verifikasi Rumor dan Signal Masalah Kesehatan Serta Komunikasi Cepat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon
c.	Penyelidikan Epidemiologi KLB
d.	Supervisi Surveilans Campak AFP dan PD3I Lainnya

4. Dukungan Personil

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
 - Pejabat structural sebanyak 4 orang
 - Dokter sebanyak 1 orang

- Perawat sebanyak 9 orang
 - Kesehatan masyarakat sebanyak 5 orang
 - Kesehatan lingkungan sebanyak 2 orang
 - Staf administrasi sebanyak 11 orang
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi terdiri dari :
- Personil Provinsi : 12 Orang Personil Kabupaten kota

5. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- 1) Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
- Koordinasi tingkat cluster kesehatan masih belum berjalan dengan baik, terutama dalam mengedukasi pengurangan resiko krisis kesehatan terhadap penduduk yang terdampak ataupun penduduk yang tinggal diwilayah berpotensi bencana.
 - Pengetahuan petugas kesehatan di kabupaten/kota terutama puskesmas terkait krisis kesehatan akibat bencana masih kurang.
 - KIE pengurangan resiko krisis kesehatan akibat bencana masih merupakan tugas dan tanggungjawab pelaksana program penanggulangan krisis kesehatan dan masalah kesehatan.
 - Minimnya pembiayaan untuk penanganan krisis kesehatan.
 - Belum optimal kerjasama Lintas Sektor dalam Pelaksanaan penanganan krisis kesehatan akibat bencana
- 2) Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi

Solusi

- a. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi terdiri dari :
- Melakukan Penguatan kapasitas cluster kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana
 - Melakukan Pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) bagi petugas kesehatan
 - Melakukan Pertemuan Penguatan LP dan LS
 - Melakukan penyusunan peta rawan bencana di setiap kabupaten/kota dan puskesmas untuk pengurangan resiko krisis kesehatan
 - Melakukan kegiatan pemantauan potensi Krisis Kesehatan Kabupaten/ Kota
- b. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi
- Tidak tersedianya kendaraan Operasional khusus Penyelidikan Epidemiologi KLB dalam menunjang Indikator program yaitu Penanganan < 24 Jam dengan mempertimbangkan keadaan di lapangan yang menjangkau tidak hanya sampai di Kabupaten/Kota tetapi arus sampai di Kecamatan bahkan Desa-desa.

C. URUSAN PEKERJAAN UMUM / DINAS CIPTA KARYA DAN SUMBER DAYA AIR

Penerapan SPM Bidang Urusan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi Tengah sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Hal

tersebut dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

a. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Jenis Pelayanan Dasar pada Pemerintah Daerah provinsi terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota

b. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan di Sulawesi Tengah tahun 2022 terurai pada tabel 1 berikut :

Tabel 20: Target Pencapaian SPM Bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Jenis pelayanan Dasar	Idikator pencapaian	Target capaian	Anggaran (rp)	Ket
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	44,08	13.949.946.275	-
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan		592.315.475	

c. Realisasi

Realisasi pencapaian pelayanan dasar bidang urusan Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan di Sulawesi Tengah tahun 2022 terurai pada tabel berikut :

Tabel 21 : Realisasi Capaian SPM Urusan PU/Dinas Cipta Kerja/Sumber Daya Air

No	Jenis pelayanan Dasar	Idikator pencapaian	Target capaian	Anggaran (rp)	Ket
1.	Pemenuhan kebutuhan Air Minum Curah lintas kabupaten/kota	Persentase (%) kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota	45%	-	SPM Kewenangan kab/kota
2	Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik regional lintas kabupaten/kota	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota	22.17%	-	-

d. Dukungan Personil

Untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Air Minum Dan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air yang terdiri dari jumlah personil sebagai berikut :

Tabel 22 : Jumlah Sumber Daya Manusia Pendukung Capaian SPM Bidang AMPLP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah (orang)
1	Eselon	
	a. III	1
	b. IV	2
2	Jabatan Fungsional	1
3	Staf PNS	20

4	PHL	25
---	------------	----

Sumber : Dinas Cipta Karya Dan Sumber Daya Air Provinsi SulawesiTengah, 2022

e. Permasalahan Dan Solusi

Permasalahan dan Solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi penerapan dan pencapaian SPM, baik eksternal maupun internal dan langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh

a. Air minum curah regional

1. SPAM Regional Terbangun

Dalam upaya pemenuhan SPM air minum curah di kawasan regional, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sejak tahun 2013 – 2016 bekerja sama dengan Kementerian PUPR rencananya akan membangun SPAM Regional Pasigala dengan kapasitas produksi air minum curah 2 x 300 liter/detik yang akan melayani sebagian Kota Palu, sebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala.

Untuk tahap pertama telah dibangun Intake, Jaringan Pipa Transmisi, Instalasi Pengolah Air (IPA) kapasitas 300 liter/detik, Reservoir dan Jaringan Distribusi Utama (JDU) serta Reservoir Offtake dan telah berfungsi untuk melayani Sambungan Rumah (SR) di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala.

Namun akibat adanya bencana alam (gempa bumi, lukuifaksi dan tsunami) pada tanggal 28 September 2018 di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala menyebabkan rusaknya infrastruktur pada SPAM Regional Pasigala. Akibat kerusakan infrastruktur tersebut SPAM Regional Pasigala tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Kerusakan infrastruktur SPAM Regional Pasigala meliputi kerusakan pada :

- Intake

- Jaringan Pipa Transmisi AirBaku
- Instalasi Pengolahan Air(IPA
- Jaringan Pipa Distribusi Utama (JDU)
- Reservoir Offtake
- Jaringan Pipa Distribusi Pembagi(JDB) Masalah

Internal yang dihadapi :

- Kekurangan dana untuk pembiayaan operasional dan perbaikan infrastruktur
- Keterbatasan SDM dalam pengoperasionalan SPAM Pasigala baik dalam segi kualitas dan kuantitas
- Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan perawatan dan pemeliharaan SPAM Pasigala

Masalah eksternal yang dihadapi:

- Perlunya regulasi yang secara hukum mengikat masing-masing pihak pemerintah kabupaten kota dalam hal ini pemerintah Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala dalam hal penarikan retribusi yang menguntungkan masing - masing pihak sehingga dapat menghasilkan kerjasama yang baik dalam pemanfaatan dan pemeliharaan SPAM Pasigala secara regional menguntungkan masing-masing pihak sehingga dapat menghasilkan kerjasama yang baik dalam pemanfaatan dan pemeliharaan SPAM Pasigala secara regional.
- Belum rampungnya Desain New SPAM Pasigala yang dibuat oleh pihak Balai Wilayah Sungai III dalam rangka perbaikan Struktur dan Infrastruktur SPAM Pasigala.

Potensi SPAM Regional

Selain SPAM Regional Pasigala, berdasarkan hasil identifikasi SPAM Regional terdapat beberapa kawasan regional (prioritas) yang berpotensi dibangun SPAM Regional lainnya, antara lain :

- Kawasan perbatasan antara Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tolitoli
- Kawasan perbatasan antara Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Poso

2. Air limbah domestic regional

Saat ini pemerintah provinsi Sulawesi tengah belum memiliki infrastruktur untuk pengolahan air limbah (SPAL) domestic regional. Namun demikian terdapat kawasan regional yang berpotensi dibangun SPAL Regional yaitu antara Kab. Sigi dan Kota Palu.

Masalah Internal yang dihadapi :

- Belum ada regulasi baik di tingkat provinsi maupun tingkat Kab/Kota tentang SPAL Regional
- Belum dilakukan identifikasi dan studi kelayakan pembangunan SPAL regional walaupun SPAL Regional masuk dalam RTRW Prov.Sulteng
- Minimnya alokasi anggaran untuk SPAL Regional Kurangnya Sosialisasi dan kampanye public tentang sanitasi layak

Masalah Eksternal yang dihadapi :

- Secara geografis jarak antara daerah Kab/Kota di Sulawesi Tengah berjauhan sehingga sangat sedikit potensi pembangunan SPALRegional
- Perlunya penjajakan dan kemauan kuat antara Pemda Kab/Kota untuk bekerja sama secara regional.

D. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Penerapan SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR RI dan dijadikan acuan dalam target

pencapaiannya. Hal tersebut dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.

1. **Jenis Pelayanan Dasar**

Dalam Permendagri No. 59 Tahun 2021 dijelaskan bahwa jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada 2 (dua) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari :

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi.
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
- c. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.
- d. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

2. **Target Pencapaian SPM**

Target pencapaian pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat di Sulawesi Tengah tahun 2022 terurai pada tabel 1 berikut :

Tabel 23. : Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Satuan	%
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga Negara Korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	110.214	RT	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi	Jumlah warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	RT	100

Sumber :Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

Untuk layanan 2, tahun 2022 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulawesi Tengah belum melaksanakan kegiatan untuk pemenuhan layanan tersebut.

Hasil capaian pelayanan dasar bidang perumahan rakyat di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 mencapai 93,85% seperti terurai pada tabel berikut.

Tabel 24 : Hasil Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Capaian		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni Bagi korban bencana provinsi	Jumlah warga Negara korban Bencana yang memperoleh rumah Layak huni	100 %	93,85 %	93,85 %
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni yang bagi masyarakat yang terkena Relokasi program pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah Daerah Provinsi yang memperoleh Fasilitas penyediaan rumah Yang layak huni	0	0	100

3. Alokasi Anggaran dan Realisasi

1. Alokasi Anggaran

Untuk mendukung pencapaian pelayanan minimal bidang perumahan rakyat tahun anggaran 2022, anggaran diperoleh bersumber dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan BPBD serta bersumber dari APBD. Alokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 25 : Alokasi Anggaran untuk Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jenis Layanan Dasar	Target	Satuan	Anggaran (Rp.)		
				APBD		APBN
				Dinas Perkimtan	BPBD	
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi	110.214	KK	9.226.476.864		532.357.439.000

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah 2022

4. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Bidang Perumahan Rakyat selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Untuk Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi pencapaian SPM digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 26 : Realisasi SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	%
1	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak Huni	110.214	103.438	RT	93,85
2	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	RT	100

Sumber :Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

5. Dukungan Personil

Untuk mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang terdiri dari :

Tabel 27 : Jumlah Sumber Daya Manusia Pendukung Capaianm SPM Bidang Perumahan Rakyat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No.	Jenis/Kualifikasi	Jumlah (orang)
1	Eselon	
	a. II	1
	b. III	5
2	Jabatan Fungsional	12
3	Pangkat/Golongan	
	a. IV	14
	b. III	46
	c. II	2
4	Jenjang Pendidikan	
	a. S2	22
	• PNS	3
	• PHL	
	b. S1/D4	33
• PNS	96	
• PHL		
	c. DIII	

• PNS	3
• PHL	4
d. SMA sederajat	
• PNS	3
• PHL	45
e. SLTP sederajat (PNS)	1

Sumber : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah, 2022

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Perumahan Rakyat Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulawesi Tengah dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan

- a. Anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian target SPM bidang perumahan belum mencukupi untuk penanganan 3 tahun.
- b. Pemenuhan layanan 1 jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, rumah yang terdampak sejumlah 110.214 unit yang ditangani dengan 2 Pola yaitu :

➤ Perbaikan rumah secara Stimulan= 98.512 Unit

➤ Relokasi (Huntap) = 11.702 Unit

Untuk stimulan pendanaan sudah tersedia melalui BNPB dan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten/Kota, sedangkan untuk Pola relokasi (Huntap) penanganan bantuan melalui sumber dana APBN (PUPR), NGO, APBD Provinsi, masih menyisakan 6.019 Unit rumah yang harus segera dibangun.

- c. Permasalahan lahan huntap yang telah ditetapkan oleh pemerintah masih menjadi kendala yang belum terselesaikan

2) Solusi

- a. Pembangunan huntap yang masih membutuhkan penambahan pendanaan untuk penyelesaian tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang merupakan layanan SPM bidang perumahan rakyat.
- b. Hendaknya Pemerintah Pusat dan Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten/Kota, saling bersinergi untuk mendapatkan data yang valid warga terdampak bencana yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni terutama pembangunan huntap relokasi.
- c. Pemerintah Kabupaten/kota yang masih memiliki permasalahan lahan hendaknya serius dalam penyelesaian lahan yang akan digunakan sebagai tempat relokasi huntap.

E. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, mekanisme pelaporan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal pada Bab IV Pelaporan Pasal 23 ayat (1) menyebutkan Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) Tahun Anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun anggaran berakhir, dan dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan

materi Laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala, dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM.

Penjabaran dari ketentuan tersebut diatas, jenis pelayanan dasar bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat meliputi:

1. Program Pemeliharaan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dengan indikator:
 - Persentase pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tertangani.
 - Persentase Perda/Perkada yang ditegakan
2. Program Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan penyelamatan Non Kebakaran dengan indikator :
 - Persentase Kabupaten/Kota yang diberikan Pendampingan Pelayanan Pemadaman dan Penyelamatan Kebakaran.

Standar Pelayanan Minimal pada urusan Ketentraman umum, ketertiban dan perlindungan masyarakat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 28 : SPM Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

Perangkat Daerah		Jenis SPM
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	-	Program Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum - Persentase Gangguan trantibum yang dapat Diselesaikan - Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan Program Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta Penyelamatan Non Kebakaran Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

2. Target Pencapaian SPM

Target Pencapaian SPM yang tertuang dalam Program Tahun Anggaran 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 29 : Target capaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat

No.	PROGRAM DAN INDIKATOR	TARGET RPJMD	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	Program Ketenteraman, Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat	100 %	100 %	100 %
	- Persentase Gangguan trantibumyang dapat diselesaikan	20 kasus	20 kasus	100%
	- Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	11,34%	18,18%	106,32%
2	Program Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan serta Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	100 %	100 %
	- Persentase Kabupaten/Kota yang menadapat Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	100%

3. Alokasi Anggaran dan Realisasi

1. Alokasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja mendapat alokasi anggaran belanja langsung sebesar Rp 15.827.855.021,- (Lima Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp 14.707.752.259,- (Empat Belas Miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Ribu Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah) Persentase realisasi tersebut sebesar **92,92%**.

2. Realisasi

Realisasi Penerapan dan Pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022 digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 30 : Realisasi penerapan dan pencapaian Anggaran

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	12.973.319.746	12.840.421.996	98,98
	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499.191.100	447.676.924	89,68
	1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.390.100	77.872.100	95,68
	2. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	149.592.000	133.767.924	89,42
	3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	268.209.000	236.036.900	88,00
	2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.025.994.318	9.304.625.679	92,81
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.025.994.318	10.025.994.318	92,81

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
	3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.018.420	37.018.420	100
	1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.018.420	37.018.420	100
	4 Kegiatan Penagadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	132.897.750	8.990.625	6,77
	1. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.897.750	8.990.625	6,77
	5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.603.074.075	1.547.345.587	96,61
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.424.458.875	1.373.171.132	96,49

		2. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber hdaya air dan Listrik	178.615.200	174.174.455.	97,51
--	--	---	-------------	--------------	-------

6	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		675.144.083	604.258804	89,50
	1. Sub Kegiatan Penyediaan Jas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		481.817.000	421.836.590	87,55
	2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		193.327.083	192.422.214	94,36
2	PROGRAM PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		2.379.468.750	2.312.231.452	97,17
	1	Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawala.	1.886.631.875	1.843.790.256	97,73

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Target	Realisasi	Persentase (%)
		1. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Daeteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli dan Pengawalan	1.469.735.000	1.450.168.110	98,67
		2. Sub Kegiatan Penindakan Atas gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan kerusuhan Masa	143.009.000	136.318.216	95,32
		3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	32.150.000	32.997.625	74,64
		4. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64.869.975	62.169.975	96

		5. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	99.161.350	94.330.225	95
		6. Sub Kegiatan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan	77.703.550	76.806.105	99

	2	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	308.494.875	296.077.500	95,97
		1. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	82.882.000	82.382.000	99
		2. Sub kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	225.612.875	213.695.500	94,72
	3	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	184.342.000	172.363.696	93,50
		1. Sub kegiatan Penegmbaan Kapasitas dan Karis PPNS	184.342.000	172.363.696	93,50

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Persentase (%)
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	475.066.525	447.464.143	94,19
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	446.011.525	420.562.675	94,29
	1. Sub kegiatan Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	135.171.775	126.010.525	93,22
	2. Sub Kegiatan Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	16.927.250	16.177.250	96
	3. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	263.169.750	253.569.750	96,35
	4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kerja sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30.742.750	24.805.150	80,69
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	29.055.000	26.901.468	93
	1. Sub Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	29.055.000	26.901.468	93

4. Dukungan Personil

Sumber daya satuan polisi pamong praja
Provinsi Sulawesi Tengah s/d desember 2022

A. Jumlah Personel :

Status - Pegawai Negeri Sipil: 94 Personel

- Non ASN :110 Personel
- PPNS Satuan Polisi Pamong Praja : 3 Personel

B. Rincian Personel ASN/PNS :

a) Tingkat Pendidikan

Pendidikan	SD	SMP/SLTP	SMA/SLTA	S1	S2	S3
<i>Jumlah</i>	2	2	53	21	9	1

b) Kepangkatan/Golongan Ruang

Kepangkatan	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV
<i>Jumlah</i>	4	39	42	11

c) Jenis Kediklatan

Diklat	Struktural	Fungsional	Pemerintahan	Teknis	Diklatsar Pol PP	Lain-Lain / Sejenisnya
<i>Jumlah</i>	20	23	25	20	75	-

C. Kelembagaan

Nomenklatur Kelembagaan	Sebutan Lain	Tipologi II/a*II/b
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah	-	II/a

D. Sarana Prasarana

SAPRAS	Gedung	Kendaraan Roda 2 Ops Kedinasan Aparatur	Kendaraan Roda 4 Jenis Patroli	Kendaraan Dinas Operasional Jenis Truk	Peralatan Ops Anti Huru Hara Jenis Tameng	Peralatan Ops Anti Huru Hara Dalmas
<i>Jumlah</i>	1 (<i>satu</i>)	20 Unit	4 Unit	1 Unit (<i>Jenis Truk</i>)	30 Buah	

5. Permasalahan dan Solusi

Solusi/saran tindak terhadap permasalahan indikator penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal 2022, perlu perhatian khusus dan sungguh-sungguh baik pemerintah melalui kementerian terkait dan pemerintah daerah berkaitan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Program dan kegiatan teknis dalam dokumen perencanaan

kinerja merupakan indikator prioritas SPM atau di dahulukan, baik dari sisi regulasi hukum perundang-undangan yang di selaraskan kedalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan untuk penerapan dan pencapaiannya melalui penetapan pelaksanaannya khusus dukungan kesesuaian anggaran terhadap indikator kegiatan prioritas SPM pelayanan dasar dilakukan peningkatan anggaran yang merupakan kewajiban pemerintah daerah sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan/memenuhi sarana dan prasarana minimal satuan polisi pamong praja dan melakukan pembinaan teknis operasional termasuk/utamanya pemenuhan pakaian dinas, perlengkapan dan peralatan operasi dan pengendalian tibus tranmas. Untuk penguatan kelembagaan akan dilakukan peningkatan kinerja melalui perencanaan strategis, pengawasan, evaluasi dan pengendalian secara berkala dalam sistem pengelolaan program/kegiatan yang didukung data kinerja, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan dan pelaporan masih-masing bidang lingkup sat pol pp provinsi dan lintas kabupaten/kota berkaitan dengan masalah/kendala pelaksanaan indikator SPM untuk tindak lanjutnya dalam rangka optimalisasi penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

- 2) Peningkatan kapasitas sumber daya SDM aparatur yang berkompeten, komponen/unsur lainnya dalam penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal melalui pengalokasian anggaran kegiatan diklat teknis dan

fungsional aparatur, pembinaan masyarakat/ bimbingan/ sosialisasi/ penyuluhan/ diklat/ pembekalan/ sejenisnya terhadap seluruh cakupan indikator standar pelayanan minimal ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

E. URUSAN SOSIAL

Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yakni pada pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial yaitu program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kelima pelayanan dasar dimaksud meliputi:

- 1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti.
- 2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti.
- 3) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti.
- 4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya

gelandangan dan pengemis di dalam panti.

- 5) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi

Pemerintah provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan pelayanan sosial bagi sasaran penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna sosial terutama gelandangan dan pengemis adalah melalui mekanisme dalam panti. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas Badan dan sudah mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melaksanakan pelayanan sosial berbasis panti yaitu UPT Panti Sosial Anak di Kota Palu, UPT Panti Sosial Tresna Wredha Madago di Tentena, Kabupaten Poso (yang melaksanakan pelayanan sosial bagi lanjut usia terlantar lingkup provinsi), UPT Panti Sosial Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial di Biromaru, Kabupaten Sigi(yang melaksanakan pelayanan sosial bagi tuna sosial seperti wanita tuna sosial, gelandangan, pengemis, orang dengan gangguan jiwa bera tpasca rehabilitasi medis)

i. Pelayanan Dasar kepada Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas yang menjadi prioritas sasaran Dinas Sosial adalah penyandang disabilitas terlantar dan miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan atau yang terdapat dalam panti disabilitas terdaftar di Sulawesi Tengah sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel. 31 : Data Penyandang Disabilitas Terlantar Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	DISABILITAS	
		PANTI	BUKAN PANTI
Kabupaten/ Regency			
1	KAB SIGI		1475
2	KAB DONGGALA		1692
3	KAB PARIGI MOUTONG		2324
4	KAB TOLITOLI		1135
5	KAB POSO		1781
6	KAB TOUNA		879
7	KAB MORUT		734
8	KAB MOROWALI	267	583
9	KAB BANGGAI		2214
10	KAB BANGKEP		1073
11	KAB BALUT		315
12	KAB BUOL		1217
Kota / Manucipolity			
13	KOTA PALU	297	870
SULAWESI TENGAH		564	16292

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial / DTKS Tahun 2020 (Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

ii. Pelayanan Dasar kepada Anak Terlantar

Anak terlantar yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan 40% terbawah di Sulawesi Tengah sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 32 : Jumlah Anak Terlantar Tahun 2022

NO	KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH ANAK TERLANTAR (JIWA)
1	2	3
1.	BANGGAI	46.191
2.	BANGGAI KEPULAUAN	18.357
3.	BANGGAI LAUT	6.942
4.	BUOL	28.701
5.	DONGGALA	55.159
6.	KOTA PALU	28.036
7.	MOROWALI	15.162
8.	MOROWALI UTARA	14.385
9.	PARIGI MOUTONG	78.187
10.	POSO	33.163
11.	SIGI	37.321
12.	TOJO UNA-UNA	23.678
13.	TOLI-TOLI	35.302
TOTAL		420.620

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial DTKS Tahun 2021(Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

Sedangkan anak terlantar yang mendapatkan pelayanan dan pengasuhan di dalam panti se Sulawesi Tengah digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 32. Jumlah Panti Asuhan Anak dan Anak dalam pengasuhan panti Tahun 2022

NO	KABUPATEN/KOTA	PANTI ASUHAN		ANAK ASUH	
		PEMERINTAH	NON PEMERINTAH	PEMERINTAH	NON PEMERINTAH
1	2	3	4	5	6
	Kabupaten/ Regency				
1	Banggai Kepulauan	-	2 Panti	-	152 Anak
2	Banggai	-	17 Panti	-	645 Anak
3	Morowali	-	2 Panti	-	78 Anak
4	Poso	-	21 Panti	-	521 Anak

5	Donggala	-	5	Panti	-	176	Anak
6	Toli Toli	-	8	Panti	-	229	Anak
7	Buol	-	5	Panti	-	28	Anak
8	Parigi Moutong	-	4	Panti	-	142	Anak
9	Tojo Una-una	-	1	Panti	-	80	Anak
10	Sigi	-	12	Panti	-	372	Anak
11	Banggai Laut	-	3	Panti	-	30	Anak
12	Morowali Utara	-	3	Panti	-	135	Anak
13	Kota / Municipality						
14	Palu	1	55	Panti	-	1198	Anak
	Sulawesi Tengah	1	138	Panti	0	3786	Anak

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 (Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

UPT. Panti Sosial Anak dalam memberikan pelayanan sosial berupa bimbingan motivasi kepada anak- anak jalanan yang merupakan rujukan dari anak- anak jalan binaan Dinas Sosial Kabupaten Kota di Sulawesi Tengah dan bimbingan keterampilan bagi anak-anak yang putus sekolah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan mandiri.

iii. Pelayanan Dasar kepada Lanjut Usia Terlantar

Tabel 33 : Data Pelayanan Dasar Lnjut Usia Tahun 2022 /rekap data terpadu kesejahteraan sosial (dtk) lansia Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah

NO	NAMA KABUPATEN	JUMLAH LANJUT USIA TERLANTAR (JIWA)
1	BANGGAI	18.242
2	BANGGAI KEPULAUAN	6.121
3	MOROWALI	4.804
4	POSO	13.296

5	DONGGALA	12.479
6	TOJO UNA-UNA	6.285
7	SIGI	10.109
8	BANGGAI LAUT	1.645
9	MOROWALI UTARA	5.071
10	TOLI-TOLI	8.480
11	BUOL	6.337
12	PARIGI MOUTONG	18.339
13	PALU	6.932
JUMLAH		118.140

Sumber : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 (Sesuai Kepmensos No.146/huk/2020)

2. Target Pencapaian SPM

Tabel. 34. :Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI DALAM PANTI		ANGGARAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	-	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	
		-1	
1	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas dan merujuk ke Panti Masyarakat	50	59.423.000
3	Penyediaan sandang	0	
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	0	
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	
6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	
7	Penyediaan alat bantu	25	75.375.000
8	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	0	
9	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	50	231.150.000
10	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	0	
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	0	

Tabel. 35. : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI DALAM PANTI		ANGGARAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	94	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah warga negara yang	
		berhak mendapat layanan	
		-1	
1	Pengasuhan	0	
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Anak	25	123.100.000
3	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	0	
4	Penyediaan sandang	15	24.931.250
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Anak	0	
6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	0	
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	25	31.067.000
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15	127.160.600
9	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	25	34.728.875
10	Fasilitas pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	0	
11	Akses ke layanan pendidikan	1	3.000.000
12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	
13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1.800.000

Tabel. 36.:Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TELANTAR DI DALAM PANTI		ANGGARAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1,022	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah warga negara yang	
		berhak mendapat layanan	
		-1	
1	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	48	66.750.000
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	
3	Penyediaan sandang	48	32.892.500
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	5	
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	0	
6	Penyediaan alat bantu	0	
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	48	47.019.140
8	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	
9	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	575	1.058.083.000
10	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	48	14.795.500
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	0	
12	Akses ke layanan kesehatan dasar	48	4.382.000
13	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	4.382.000

15	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	6.080.000
16	Pemulasaraan	5	20.000.000
17	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Pantu Anak dan merujuk ke Pantu Masyarakat	0	
18	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Pantu Anak dan merujuk ke Pantu Masyarakat	0	
19	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Pantu Lanjut Usia	0	

Tabel. 37. :Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Dalam Pantu

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI		ANGGARAN
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	25	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	
		-1	
1	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Pantu Gelandangan dan Pengemis	45	66.750.000
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Pantu Gelandangan dan Pengemis merujuk ke Pantu Masyarakat	0	
3	Penyediaan sandang	25	32.892.500
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang nmmiliki Pantu Gelandangan dan Pengemis	0	
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Pantu Gelandangan dan Pengemis	0	

6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan merujuk Ke Panti Masyarakat	0	
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	45	47.019.140
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	0	
9	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	25	11.300.000
10	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	25	105.531.000
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	
12	Akses ke layanan pendidikan	1	10.000.000
13	Pemulangan ke daerah asal	15	

Tabel. 38: Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi

NO	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI		ANGGARAN
		Yang Terjadi Bencana	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	
		Yang Harus Dilayani	
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	350	
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	
		-1	
1	Penyediaan permakanan	4175	299.999.825
2	Penyediaan sandang	0	

3	Peyediaan tempat penampungan pengungsi	0	
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	
5	Pelayanan dukungan Psikososial	34	100.000.000

3. Alokasi Anggaran dan Realisasi

a. Alokasi Anggaran

Pada tahun 2022, sumber penganggaran pelaksanaan program pembangunan kesejahteraan sosial pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah berasal dari dua sumber yakni APBD dan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan), dengan rincian sebagai berikut:

- **APBD,**

Pagu Anggaran pada tahun 2022 sebesar Rp. 61.630.762.308,- (*enam puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh dua tiga ratus delapan rupiah*), realisasinya Rp. 61.630.762.308,- (*enam puluh satu milyar enam ratus tiga puluh juta tujuh ratus enam puluh dua tiga ratus delapan rupiah*) atau 99,55 %.

b. Realisasi

Realisasi rehabilitasi social dasar penyandang disabilitas digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel. 39. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Dalam Pantii

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TELANTAR DI DALAM PANTI	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	REALISASI	ANGGARAN	
						Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)				80.00 %		
	Jumlah yang Harus Dilayani :	125	125	0	100%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				4.00 %		

		Jumlah warga negara Yang	Jumlah warga negara	Jumlah yang	20.00 %		
		berhak mendapat layanan	yang terlayani	belum terlayani			
		-1	-2	-3			
1	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%		
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas dan merujuk ke Panti Masyarakat	23	23	0	100.00 %	48.615.600	48.519.000
3	Penyediaan sandang	0	0	0	0%		
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%		
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%		
6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Disabilitas dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
7	Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%		
8	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	0	0	0	0%		
9	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	13	13	0	100.00 %	85.657.000	85.657.000
10	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	0	0	0	0%		
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	0	0	0	0%		
12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%		
13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%		

14	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Disabilitas	0	0	0	0%		
15	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0%		

Tabel. 40 : Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TELANTAR DI DALAM PANTI				REALISASI	ANGGARAN	
						PAGU	REALISASI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %		
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani				
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	94	94	0	100%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				12.31 %		
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	61.54 %		
		-1	-2	-3			
1	Pengasuhan	0	0	0	0%		
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Anak	25	25	0	100.00 %	123.100.000	123.090.000
3	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	0	0	0	0%		
4	Penyediaan sandang	15	15	0	100.00 %	24.931.250	24.900.000
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang nemiliki Panti Anak	0	0	0	0%		

6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak	0	0	0	0%		
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	25	25	0	100.00 %	29.084.000	31.046.000
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	15	15	0	100.00 %	134.560.600	125.750.600
9	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	25	25	0	100.00 %	34.728.875	34.728.875
10	Fasilitas pembuatan Akte Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%		
11	Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00 %	3.000.000	3.000.000
12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	1	1	0	100.00 %	1.000.000	1.000.000
13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %	1.800.000	1.800.000

Tabel. 41 : Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TELANTAR DI DALAM PANTI	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	89.47 %	ANGGARAN	
						PAGU	REALISASI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Yang Belum Terlayani	80.00 %		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	1,022	1,022	0	100%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				9.47 %		
		Jumlah warga	Jumlah warga	Jumlah yang	47.37 %		
		negara	negara				

		yang					
		berhak	yang	belum			
		mendap	terlayani	terlayani			
at	-2	-3					
layanan	-1						
1	Penyediaan permakanaan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	48	48	0	100.00 %	882.600.000	879.280.000
2	Penyediaan permakanaan bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
3	Penyediaan sandang	48	48	0	100.00 %	64.713.940	64.713.940
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0%		
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0%		
6	Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%		
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti Sosial	48	48	0	100.00 %	56.776.622	56.754.343
8	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Lanjut Usia dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
9	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	575	575	0	100.00 %	1.050.375.337	1.046.858.058
10	Pemberian bimbingan aktivitas hidup sehari-hari	48	48	0	100.00 %	7.264.775	7.264.775
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Penduduk	0	0	0	0%		
12	Akses ke layanan kesehatan dasar	48	48	0	100.00 %	2.750.000	2.750.000
13	Pemberian pelayanan penelusuran Keluarga	1	1	0	100.00 %	3.750.000	3.750.000
14	Akses layanan pengasuhan kepada	0	0	0	0%		

	keluarga pengganti						
15	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	1	1	0	100.00 %	9.120.000	8.945.000
16	Pemulasaraan	5	5	0	100.00 %	23.400.000	23.400.000
17	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
18	Penyediaan permukiman bagi daerah yang belum memiliki Panti Anak dan merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
19	Penyediaan permukiman bagi daerah yang memiliki Panti Lanjut Usia	0	0	0	0%		

Tabel. 42. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis Dalam Panti

NO	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI DALAM PANTI					90.77 %	ANGGARAN	
		Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum		PAGU	REALISASI	
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR -80%							
		Yang Harus Dilayani	Yang Terlayani	Terlayani	80.00 %			
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	25	25	0	100%			
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				10.77 %			
		Jumlah warga negara yang	Jumlah warga negara	Jumlah yang	53.85 %			
		Berhak mendapat layanan	yang terlayani	belum terlayani				
		-1	-2	-3				

1	Penyediaan permakanan bagi daerah yang memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	45	45	0	100.00 %	75.750.000	63.126.950
2	Penyediaan permakanan bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis merujuk ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
3	Penyediaan sandang	25	25	0	100.00 %	32.892.500	32.892.500
4	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0%		
5	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis	0	0	0	0%		
6	Penyediaan asrama yang mudah diakses bagi daerah yang belum memiliki Panti Gelandangan dan Pengemis dan merujuk Ke Panti Masyarakat	0	0	0	0%		
7	Penyediaan perbekalan kesehatan didalam Panti	45	45	0	100.00 %	47.019.140	41.735.800
8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	0	0	0	0%		
9	Pemberian bimbingan keterampilan hidup sehari-hari	25	25	0	100.00 %	11.300.000	11.300.000
10	Pemberian bimbingan keterampilan dasar	25	25	0	100.00 %	105.531.000	99.565.400
11	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%		
12	Akses ke layanan pendidikan	1	1	0	100.00 %	10.000.000	10.000.000
13	Pemulangan ke daerah asal	0	0	0	0%		

Tabel. 43. Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Provinsi

NO	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA PROVINSI	Ya Terjadi Bencana	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	88.00 %	ANGGARAN	
						PAGU	REALISASI
	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%)	Jumlah Total	Jumlah Total	Yang Belum Terlayani	80.00 %		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	350	350	0	100%		
	PERSENTASE PENCAPAIAN MUTU MINIMAL LAYANAN DASAR (20%)				8.00 %		
		Jumlah warga negara yang	Jumlah warga negara	Jumlah yang	40.00 %		
		berhak mendapat layanan	yang terlayani	belum terlayani			
		-1	-2	-3			
1	Penyediaan permakanan	3175	3175	0	100.00 %	199.999.825	105.664.400
2	Penyediaan sandang	0	0	0	0%		
3	Peyediaan tempat penampungan Pengungsi	0	0	0	0%		
4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0	0%		
5	Pelayanan dukungan Psikososial	34	34	0	100.00 %	100.000.000	100.000.000

Atas dasar pemahaman bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan hak dan pelayanan dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada daerah untuk kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkan Rencana Aksi yang tepat bagi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Provinsi Sulawesi Tengah yakni terintegrasinya pencapaian penerapan SPM dalam dokumen perencanaan pembangunan serta tersinerginya rencana pencapaian penerapan SPM tersebut dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Mencermati capaian penerapan SPM Bidang Sosial pada tahun 2022 ada pada tabel data realisasi kinerja SPM Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, beberapa hal yang dapat disimpulkan yakni:

- Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti mencapai **100%**. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
- Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial anak terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai **100%** . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT Panti Sosial Anak telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
- Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar dalam panti sosial skala provinsi mencapai **100%** . Hal ini disebabkan karena panti sosial skala provinsi yaitu UPT PSTW Madago telah menyelenggarakan pelayanan dan

rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.

- Penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial terlantar di dalam panti mencapai **100%**. Hal ini disebabkan karena UPT Panti Sosial Rehabilitasi Tuna Sosial Provinsi Sulawesi Tengah telah menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi dengan pencapaian kinerja sangat baik.
- Pemberian bantuan dan perlindungan bagi korban bencana skala provinsi mencapai **100%**. Hal ini disebabkan karena Dinas Sosial Provinsi telah melaksanakan penanganan bagi korban bencana dengan pencapaian kinerja sangat baik

Mencermati pencapaian penerapan SPM Bidang Sosial tersebut di atas, tentunya target SPM Bidang Sosial yang sudah dicapai akan dipertahankan, dengan pencapaian tersebut dibutuhkan evaluasi dan koordinasi dengan pihak terkait khususnya mengenai keterbatasan alokasi anggaran pada urusan sosial sehingga pada tahun depan dapat terjadi peningkatan dan dapat memperkecil deviasi capaian dari target yang sudah ditetapkan.

Tabel. 44 : Realisasi Program / Kegiatan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Sumber Dana APBD

N O	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Keterangan
1	2		3	4	5	6	7
UNIT DINAS							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH A N DAERAH PROVINSI		1 Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2 Nilai SAKIP 3 Indeks Kepuasan Masyarakat	61.630.762.308	59.687.402.172	95,30%	Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah, Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.037.825	145.627.250	83%	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat daerah	15.650.000	15.300.000	33%	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA dan DPA	20.700.000	20.695.050	99,64%	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja	109.687.825	109.632.200	99,47%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah laporan pertanggungjaban keuangan	17.435.870.151	15.761.808.537	88,21%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	16.888.735.651	15.214.791.860	87,91%	

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian (%)	Ketetapan
1	2		3	4	5	6	7
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan	547.134.500	547.016.677	99,95%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	126.118.275	125.949.475	99,80%	
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	126.118.275	125.949.475	99,80%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	223.025.375	222.641.327	99,63%	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan	6.460.525	6.424.477	100,00%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket pengadaan	10.000.000	10.000.000	100,00%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan	206.564.850	206.216.850	99,60%	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	375.345.150	374.870.000	98,93%	
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan	-	-	-	
		Pegadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	-	-	-	

II. Hasil Reviu

A. Pencermatan Kesesuaian materi dan sistematika Draft LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah sesuai dengan materi yang seharusnya dan terdiri dari 4 (empat) bab sebagaimana Pedoman Penyusunan LPPD tahun 2021,

B. Pencermatan terhadap capaian kinerja Makro tidak melampirkan data BPS berdasarkan Provinsi Sulawesi Tengah dalam angka 2022

C. Pencermatan Data dukung IKK

Pencermatan data dukung dilakukan dengan melakukan penelitian mengenai sumber data, akurasi penghitungan dan kebenaran yang meliputi IKK atas :

a. Bobot nilai pembandingan urusan pemerintahan

Bobot nilai pembandingan urusan pemerintahan menunjukkan IKK yang akurasi perhitungannya telah sesuai dan telah dilengkapi dengan data pendukung namun untuk urusan Tenaga Kerja

b. Bobot capaian kinerja IKK hasil per Bidang Urusan pemerintahan

Capaian kinerja IKK hasil per Bidang Urusan menunjukkan bahwa masih ada IKK Bidang urusan yang belum menunjukkan permasalahan dan upaya yang akan dilakukan

D. Dalam laporan capaian standar pelayanan minimal untuk 6 urusan wajib beberapa hal yang dapat menjadi perhatian Tim Penyusun LPPD yaitu :

- 1) Urusan Pendidikan tidak mencantumkan realisasi capaian SPM untuk pendidikan menengah 16-18 Tahun dan Pendidikan khusus 4 – 18 Tahun didalam permasalahan yang disampaikan tercantum realisasi SPM Pendidikan menengah saja.
- 2) Urusan Perumahan Rakyat masih menyampaik permasalahan yang sama pada tahun 2021 yaitu layanan 1 jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi, rumah yang terdampak sejumlah 110.214 unit yang ditangani dengan 2 Pola yaitu :

- Perbaiki rumah secara Stimulan = 98.512 Unit
- Relokasi (Huntap) = 11.702 Unit

Pola relokasi (Huntap) penanganan bantuan melalui sumber dana APBN (PUPR), NGO, APBD Provinsi, masih menyisakan 586 Unit rumah yang membutuhkan dana pada tahun 2021. Sedangkan tahun 2022 APBD Provinsi, masih menyisakan 6.019 Unit rumah yang harus segera dibangun.

III. Simpulan dan Rekomendasi

A. Simpulan

Berdasarkan hasil Reviu menunjukkan bahwa LPPD Provinsi Sulawesi Tengah masih terdapat beberapa hal yang mendapat perhatian untuk perbaikan antara lain:

1. Masih terdapat beberapa Kinerja capaian SPM yang belum menunjukkan realisasi yang sesuai, yaitu urusan Pendidikan pada pendidikan menengah usia 16 – 18 tahun dan pendidikan khusus pada usia 4-18 tahun
2. Masih Terdapat IKK Bidang urusan yang belum menyertakan data dukung IKK yang sesuai.
3. Masih terdapat IKK bidang urusan yang menggunakan Surat Keterangan karena belum di laksanakan dan juga belum dianggarkan.

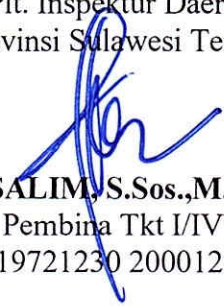
B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan dari hasil reviu, disarankan kepada tim penyusun LPPD untuk dapat melakukan sosialisasi tentang indikator kinerja standar pelayanan minimal per urusan sehingga data yang disampaikan sesuai permintaan yang dibutuhkan dan tim penyusun agar lebih selektif dalam melihat dan mencatat hasil laporan SPM urusan wajib pelayanan dasar yang dijadikan laporan dan dikirim ke Pusat.

IV. Penutup

Kami menghargai atas upaya Kepala Biro Pemerintahan beserta Tim Penyusun LPPD dalam menghasilkan Rancangan Akhir LPPD, dan disampaikan ucapan terima kasih. Selanjutnya untuk beberapa kelemahan yang ada agar diperbaiki sesuai saran .

Plt. Inspektur Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah



SALIM S.Sos.,M.Si
Pembina Tkt I/IVb
Nip 19721230 200012 1 004